

LKIP

BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2023



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NTT**



Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2023

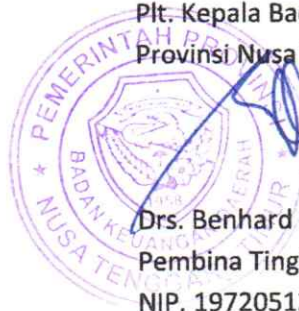
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

Catatan/Koreksi :

1. Sistematika penulisan LKIP disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Target dan realisasi kinerja yang termuat dalam tabel capaian kinerja per tahun didasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.
3. Sesuaikan capaian kinerja atau output dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 berdasarkan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Permasalahan dan solusi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023 sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Realisasi anggaran disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023.

Kupang, 01 Februari 2024

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720512 199101 1 001



KATA PENGANTAR

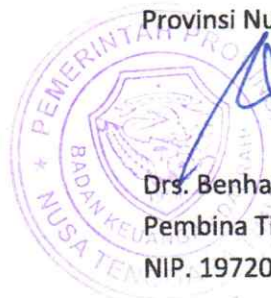
Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Berkat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi. LKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023, kiranya LKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, 01 Februari 2024

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur sesuai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Kegiatan Pengukuran Kinerja dalam LKIP ini adalah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

Selama Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	100 %	100



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Verifikasi	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Demokrasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Gambaran Umum Pelayanan	8
1.6 Sarana dan Prasarana	8
1.7 Isu Strategis	10
1.8 Maksud dan Tujuan LKIP.....	11
1.9 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	14
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	21
2.2 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini	29



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	33
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	43
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada).....	47
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	47
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	55
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja	59
B. Realisasi Anggaran	96
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Saran	102
LAMPIRAN.....	104



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf.....	8
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	16
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	22
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023.....	24
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023.....	29
Tabel 3.3 Capaian Program Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023	30
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.5 Capaian Program Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020	33
Tabel 3.6 Capaian Program Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021	36
Tabel 3.7 Capaian Program Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022	40
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD Perubahan	43
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah	44
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Prganisasi Badan Keuangan Daerah	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya good governance adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya di instansi pemerintah dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, yang dijalankan sesuai dengan rencana strategis.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan



dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.



- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Kewenangan Badan Keuangan Daerah adalah :
 - a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga lain yang telah ditunjuk.
 - f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi.
 - g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - h. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah.
 - l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 - m. Menyiapkan informasi keuangan daerah.

1.3.1 Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan.
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- 4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.



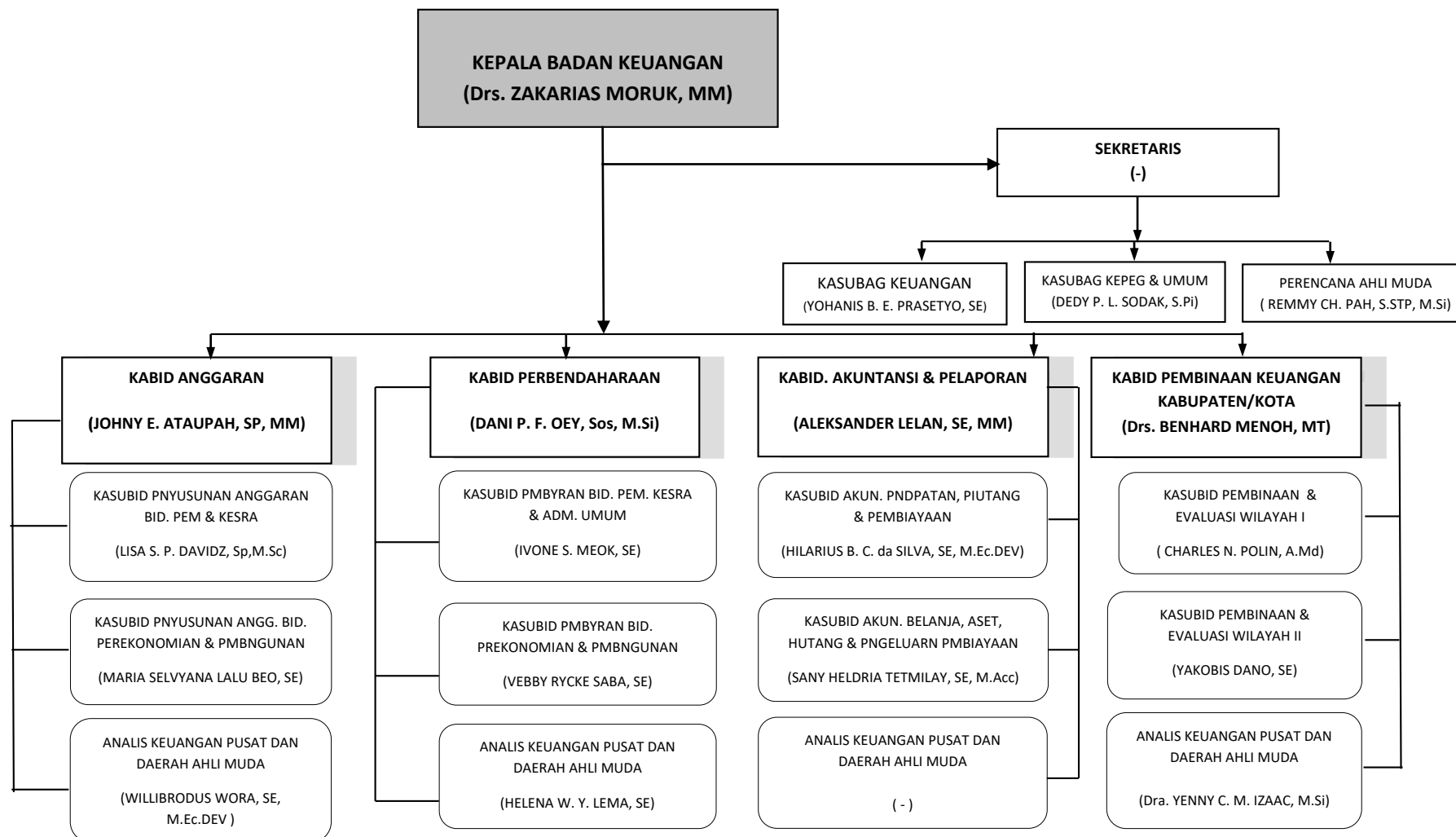
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini :



Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 didukung oleh 67 orang PNS dan 71 Tenaga Kontrak. Komposisi sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	29 orang	38 orang	67 orang
Tenaga Kontrak	41 orang	30 orang	71 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3)		-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)		11	8	19
3.	Strata 1 (S-1)		11	26	37
4.	Diploma 3		3	3	6
5.	SLTA/SMK/KPAA		4	1	5
6.	SLTP		-	-	-
Jumlah			29	38	67

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	4	-	4
3.	Eselon IV	5	5	10
4.	Fungsional	2	2	4
5.	Staf	17	31	47
Jumlah		29	38	67

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1.5 Gambaran Umum Pelayanan

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Keuangan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :



Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah

1	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	a.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	b.	Gedung Sebanyak	-	Unit
2	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	c.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	d.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
	e.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
3	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	f.	Kursi	151	Unit
	g.	Meja	162	Unit
	h.	Lemari	31	Unit
	i.	Rak Besi	13	Unit
	j.	Sofa	5	Unit
	k.	Lori Dorong	4	Unit
	l.	File Box/Kotak Surat	1	Unit
	m.	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	n.	Mobile File	2	Unit
	o.	External/ Portable Hardisk	4	Unit
	p.	P.C Unit	117	Unit
	q.	Lap Top	47	Unit
	r.	Mini Komputer	1	Unit
	s.	Note Book	15	Unit
	t.	Server	6	Unit
	u.	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit
	v.	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Unit
	w.	Peralatan Jaringan Lain-lain (Lan Tester)	1	Unit
	x.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	Unit
	y.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	96	Unit
	z.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	aa.	Megaphone	2	Unit
	ab.	Microphone Floor Stand	1	Unit
	ac.	Voice Recorder	11	Unit
	ad.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
	ae.	Mesin Absensi	7	Unit
	af.	Brandkas	2	Unit
	ag.	Genset	1	Unit
	ah.	Tripod Camera	4	Unit



	ai.	Camera Digital	1	Unit
	aj.	Facsimile	2	Unit
	ak.	Sound System	5	Unit
	al.	Televisi	7	Unit
	am.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
	an.	Webcam/Camera Web	4	Unit
	ao.	LCD Projector/Infocus	4	Unit
	ap.	Wireless	1	Unit
	aq.	Acces Point	4	Unit
	ar.	CAT 6 Cable	4	Unit
	as.	Router	4	Unit
	at.	Switch	1	Unit
	au.	Mikrobits	1	Unit
	av.	Hub	8	Unit
	aw.	Kabel UTP	1	Unit
	ax.	Main Router	1	Unit
	ay.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Unit
	az.	Interior	3	Unit
04.00	Aset tetap lainnya :			
	a.	Buku	5	buah

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

1.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.



Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
5. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

1.8 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah, secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Gambaran Umum Pelayanan
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Isu Strategis
- 1.8 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP



1.9 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS
- Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu:

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret kedalam 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).



3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhubungan dan berkaitan dengan pelayanan Badan Keuangan Daerah pada Misi 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

A. Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional, handal dan berkompeten.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas yang sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah.
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yaitu :



- a) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- b) Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional, handal dan berkompeten yaitu :
 - a) Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah.
 - b) Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah yaitu :
 - a) Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram.
 - b) Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan yang hendak dicapai diatas, maka dapat dievaluasi capaian kinerja untuk dapat menjawab hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
2. Meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen RKA	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPA	100%	100%	100%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPPA	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	80%	90%	95%	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	90%	95%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	85%	90%	95%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	85%	90%	95%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	50%	60%	80%	90%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	85%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	85%	90 %	100 %	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	85%	90%	95%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	75%	80%	90%	100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	50%	85%	95%	100%	100%
3	Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan	Persentase penyediaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

	Pengelolaan Keuangan Daerah	efektif serta terprogram						
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah secara elektronik	50%	50%	75%	100%	100%



2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan perkembangan.
2. Menciptakan standar atau mekanisme pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder sesuai pada berbagai tingkatan pemerintah.
4. Pembinaan dan evaluasi keuangan daerah Kabupaten/Kota.
5. Koordinasi perkembangan SIPD dengan pemerintah pusat.
6. Menyediakan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang berbasis teknologi untuk menunjang operasional kegiatan unit kerja.
7. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah yang handal.
8. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia sesuai kondisi.

B. Strategi

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan/akuntabel, disiplin anggaran, memenuhi rasa keadilan, efektif dan efisien.
2. Menyediakan pedoman teknis, sistem dan prosedur yang mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk Provinsi dan fasilitasi Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan daerah baik eksekutif dan legislatif.
4. Mengoptimalkan pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta kursus bagi aparatur pengelola keuangan daerah untuk Provinsi termasuk memfasilitasi untuk Kabupaten/Kota.
6. Pengembangan SIPD secara *up to date*.
7. Menyediakan sarana dan prasarana informasi pengelolaan keuangan daerah yang terupdate sesuai perkembangan teknologi.
8. Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada secara elektronik.



Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan/akuntabel, disiplin anggaran, memenuhi rasa keadilan, efektif dan efisien.	1. Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah baik eksekutif maupun legislatif.	1 Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah baik eksekutif maupun legislatif.	1. Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah baik eksekutif maupun legislatif.
		2. Menyediakan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur yang mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk Provinsi dan fasilitasi Kabupaten/Kota.	2. Menciptakan standar atau mekanisme pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.	2. Menciptakan standar atau mekanisme pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.	2. Menciptakan standar atau mekanisme pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.
		3. Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah baik eksekutif maupun legislatif.	3. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder sesuai pada berbagai tingkatan pemerintah.	3. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder sesuai pada berbagai tingkatan pemerintah.	3. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder sesuai pada berbagai tingkatan pemerintah.



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

	Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Mengoptimalkan pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.	Pembinaan dan evaluasi keuangan daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi aparatur pengelola keuangan daerah untuk Provinsi termaksud memfasilitasi untuk Kabupaten/Kota.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah yang handal.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah yang handal.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah yang handal.
	Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	2. Pengembangan SIPD secara up to date.	Koordinasi perkembangan SIPD dengan pemerintah pusat.	Koordinasi perkembangan SIPD dengan pemerintah pusat.	Koordinasi perkembangan SIPD dengan pemerintah pusat.
Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram	Menyediakan sarana dan prasarana informasi pengelolaan keuangan daerah yang terupdate sesuai perkembangan teknologi.	Menyediakan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang berbasis teknologi untuk menunjang operasional kegiatan	Menyediakan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang berbasis teknologi untuk menunjang operasional kegiatan	Menyediakan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang berbasis teknologi untuk menunjang operasional kegiatan



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

			unit kerja.	unit kerja.	unit kerja.
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada secara elektronik.	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia sesuai kondisi.	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia sesuai kondisi.	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia sesuai kondisi.



2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :



Tabel 2.3
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - undangan	100%	100 %	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen yang Dihasilkan}} \times 100$

B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah					
NO	Uraian		Alokasi		Keterangan
1	APBD		Rp.	4.127.212.356.683,00	
	a) Belanja (program)		Rp.	760.988.379.960,00	Realisasi minimal 85%
	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	14.014.276.952,00	Realisasi minimal 90%
	2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	745.535.766.688,00	Realisasi minimal 85%
	3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	1.438.336.320,00	Realisasi minimal 85%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

	b) Pendapatan	Rp.	3.366.223.976.723,00	Realisasi minimal 90%
2	APBN			
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)			
	1. -	Rp.	-	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp.	-	-

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:

1. TL temuan tahun 2023 : administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan di dibawah tahun 2023: Administrasi 100 %, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76.99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/pihak lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI
1	$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
2	$75 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
3	$55 \% \leq X < 75 \%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55 \%$	Belum Berhasil

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 2 Program Urusan dan 1 Program Penunjang Urusan. 2 Program Urusan memiliki 6 Kegiatan sedangkan 1 Program Penunjang Urusan memiliki 8 Kegiatan.

Berikut rincian keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan target, realisasi dan capaian.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini.

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Ket
			Target	Realisasi		
1	Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100	Sangat Berhasil

Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan yaitu 100%. Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023



melalui Program Urusan yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Capaian output Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Program Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat	12 Dokumen	12 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Dokumen	30 Dokumen	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	100



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Adanya penataan perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka terbentuklah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan” yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%, dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Ket
			2020	2021	2022	2023	
1	Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Tabel 3.5
Capaian Program Urusan
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100
	Pengelolaan Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Perubahan KUA PPAS dan keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD			
		Tersusunnya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD	78 Dokumen	78 Dokumen	100
		Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya rancangan Perda dan Perkada tentang APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya rancangan Perda dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Sosialisasi Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	39 PD	39 PD	100
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	39 PD dan 22 Kab/Kota se-NTT	39 PD dan 22 Kab/Kota se-NTT	100
	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terkelolanya Pembayaran Belanja Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	100
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Tersusunnya paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	75 Buku	75 Buku	100
		Terlayaninya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Terimplementasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	39 OPD	39 OPD	100
		Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terevaluasinya Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda dan Perkada tentang Perubahan penjabaran APBD Kab/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Terevaluasinya Rancangan Perda APBD Kab/Kota dan Rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	100
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	22 Kab/kota	22 Kab/kota	100
		Tersusunnya Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Buku	2 Buku	100
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	22 Kab/kota	100

Data diatas menunjukkan bahwa Pada Tahun 2020, capaian indikator RPJMD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 100% dari target 100%.



Tabel 3.6
Capaian Program Urusan
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Terlaksananya Review RKA SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Terlaksananya Review RKA Perubahan SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Laporan	2 Laporan	100
		Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
		Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Laporan	2 Laporan	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi	44 Buku	44 Buku	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Kabupaten/Kota			
		Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Buku	44 Buku	100
		Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Buku	44 Buku	100
		Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Buku	44 Buku	100
		Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100
		Tersusunnya Dokumen Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
		Tersusunnya Dokumen Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji serta Penerbitan SKPP	12 Bulan	12 Bulan	100
		Terlaksananya Koordinasi dengan SKPD dalam Penyusunan Anggaran Kas dan SPBD	39 SKPD	39 SKPD	100
		Tersusunnya Laporan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Bulan	12 Bulan	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Tersusunnya Regulasi Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 SKPD	39 SKPD	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil	30 Dokumen	30 Dokumen	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2022, SHBJ Pemerintah Provinsi NTT TA. 2022, SBK Provinsi TA. 2022	225 Buku	225 Buku	100

Data diatas menunjukkan bahwa Pada Tahun 2021, capaian indikator RPJMD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 100% dari target 100%.

Tabel 3.7

Capaian Program Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Buku	44 Buku	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Buku	44 Buku	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Buku	44 Buku	100
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Pemerintahan Daerah			
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	2 Dokumen	2 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Pelaksanaan APBD Provinsi			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Dokumen	30 Dokumen	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Harga	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Data diatas menunjukkan bahwa Pada Tahun 2022, capaian indikator RPJMD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 100% dari target 100%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan Target RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023, maka target capaian kinerja dari indikator kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD Perubahan

NO	SASARAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET RPJMD Perubahan		
				2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100



Berdasarkan pada tabel 3.8 diatas, capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam indikator kinerja **Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan** telah memenuhi target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun 2023 yaitu 100%.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2023)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2023)
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen RKA	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPA	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPPA	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	100%	78,78
			Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban	100%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2023)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2023)
			pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran		
			Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban APBD	100%	100%
		Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	90%	111,11%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	100%	90,91%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber	Meningkatnya pembinaan dan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat	100%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2023)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2023)
	Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	pembinaan dan pendampingan teknis		
		Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	100%	97%
3.	Mewujudkan Ketersedian Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram	Persentase penyediaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	100%	100%
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah secara elektronik	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa capaian target tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah mencapai dan bahkan melampaui target indikator sasaran yang ditetapkan. Dari keseluruhan target dari indikator sasaran hanya indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80% yang belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 78,78%. Hal ini disebabkan oleh



karena kinerja beberapa Perangkat Daerah dalam tingkat penyerapan anggaran belanja masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu hanya mencapai 90,91%, dikarenakan 2 (dua) kabupaten dari 22 Kabupaten/kota tidak tepat waktu menyampaikan dokumen Perubahan APBD yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai Barat.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada).

Secara Standar Nasional, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 untuk mencapai target indikator RPJMD Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 mengalami beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Faktor penyebab dari permasalahan dan solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Permasalahan yang Dihadapi terkait Penyesuaian Rincian Sub Kegiatan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum Sesuai Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya TA. 2023.
2. Pelaksanaan Survey Harga Barang dan Jasa di 21 Kabupaten/Kota Mengalami Kendala Dalam Mendapatkan Data Survey Standar Harga Dilapangan Dengan Harus Melampirkan Minimal 3 (Tiga) Referensi Harga.
3. Proses verifikasi dokumen pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan januari 2023 pada beberapa Perangkat Daerah tidak dapat divalidasi karena hasil Verifikasi oleh tim TPP tidak segera diperbaiki oleh Perangkat Daerah;
4. Hasil Evaluasi Survey Standar Harga masing-masing terdapat beberapa kekurangan data sehingga tim mengalami kesulitan dalam menganalisa data yang ada.



5. Terdapat Kendala Dalam Persiapan Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I Sesuai Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang di Tentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
6. Dalam dokumen perencanaan-RKPD Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 tidak Terdapat Beberapa Kegiatan yang Penting atau Kegiatan Rutin SKPD
7. Terdapat beberapa Catatan/Kritik/Saran dan Pertanyaan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT dalam Rapat Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Maupun Dalam Rangka Harmonisasi Pemerintah Daerah Terhadap SK Mendagri tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun 2023.
8. Terhadap Hasil Evaluasi Pembayaran TPP Semester I Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP bagi Pegawai ASN di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT Menggunakan Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya Sedangkan Presentase Dimaksud Belum Dilakukan Penilaian, Sehingga Pembayaran TPP Semester I Menggunakan Presentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Semester II Tahun Sebelumnya.
9. Proses Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai 2023 pada Beberapa Perangkat Daerah Tidak Dapat Divalidasi Karena Hasil Verifikasi Oleh Tim TPP Tidak Segera Diperbaiki Oleh Perangkat Daerah.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu :

1. Terhadap Permasalahan yang dihadapi ditindaklanjuti dengan melakukan rapat dan koordinasi dengan Perangkat Daerah secara rutin sehingga dilakukan penyesuaian/pergeseran pada Peraturan Gubernur NTT guna percepatan pelaksanaan APBD TA. 2023.
2. Terhadap kekurangan data Standar Harga sesuai Hasil Evaluasi maka dilakukan survey Standar Harga tahap II.
3. Secara Rutin Melakukan Koordinasi dan Rapat Tim Dengan Perangkat Daerah yang Mendapat Alokasi Dana Alokasi Umum Spesific Grant Yakni Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum Agar Dapat Menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I Sesuai Jadwal yang Telah Ditentukan.



4. Terhadap sejumlah kegiatan penting atau kegiatan rutin SKPD yang tidak terdapat dalam dokumen perencanaan/RKPD diakomodir dalam Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 melalui Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur NTT dan DPRD Provinsi NTT.
5. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT maupun dengan Stake Holder terkait untuk dapat menjawab catatan/kritik/saran maupun pertanyaan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT.
6. Sesuai kesepakatan rapat Tim TPP, akan Melakukan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP bagi Pegawai ASN di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT agar pembayaran TPP semester I dan semester II Tahun 2023 menggunakan Presentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah semester II tahun sebelumnya.
7. Tim TPP Terus Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti hasil verifikasi Tim TPP agar pelaksanaan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat terealisasi.
- b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Masalah-masalah yang sering dihadapi pada pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota adalah :

 1. Belum tepat waktu kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA) setiap bulan.
 2. Kesiapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah SIPD terkait penatausahaan dan pelaporan belum dapat dilaksanakan secara baik pada hamper semua daerah.
 3. Belum tepat waktu penyampaian data dan dokumen yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota yakni:
 - a. Data Penyertaan Modal penganggaran dan realisasi Penyertaan Modal Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan data penganggaran Penyertaan Modal Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 pada Bank NTT dan BUMD lainnya belum disampaikan secara lengkap;
 - b. Data penganggaran Dana Cadangan dalam rangka Pemilukada Serentak Tahun 2024 bagi kab/kota yang menganggarkan dana cadangan belum disampaikan secara lengkap;



- c. Data Penganggaran pendanaan bersama pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2023 dan 2024 yang masih terkendala karena beberapa daerah belum ada kesepakatan terkait rekening bank penampung dana Pilkada;
 - d. Dokumen Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk soft copy dan hard copy belum disampaikan secara lengkap;
 - e. Dokumen Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja belum disampaikan secara lengkap;
 - f. Dokumen hasil penyesuaian RKP DBH-CHT 22 kabupaten/kota setelah dilaksanakan rekonsiliasi RKP DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 yang belum tepat penyampaian laporannya.
- 4. Belum responsifnya kab/kota dalam menyampaikan *feed back* terhadap hasil evaluasi RAPBD TA 2023 hanya beberapa kabupaten yang menyampaikan catatan atas hasil evaluasi RAPBD kab/kota.
 - 5. Tidak semua catatan evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten/Kota TA. 2023 ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 6. Masih rendahnya penyerapan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 diakibatkan oleh keterbatasan anggaran.
 - 7. Sistem digitalisasi terkait pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota yang belum optimal.
 - 8. Beberapa Kabupaten/Kota baik itu KPU dan BAWASLU belum menyepakti penyimpanan dana pilkada kedalam rekening bank NTT.
 - 9. Pemerintah daerah kabupaten/kota kurang memahami terkait penyusunan RKP DBH-CHT dan surat pengalihan DBH-CHT. Adapun beberapa persoalan terkait DBH-CHT sbb:
 - a) Belum memahami pengisian data pada format RKP dan surat pengalihan sesuai dengan pada PMK 215 Tahun 2021;
 - b) Masih belum memahami secara baik memperhitungkan prosentase pada masing-masing bidang;



- c) Beberapa kabupaten Belum terkoordinasi kegiatan bidang penegakan hukum secara baik dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, Manggarai Barat dan Belu sehingga kegiatan seperti penegakkan hukum belum terlaksana secara baik.
10. Pada FGD BLUD yang menjadi permasalahan pokok dalam pengelolaan keuangan BLUD di Kab/Kota yakni:
- a) Belum adanya kesamaan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsi BLUD, khususnya pada aspek pengelolaan pendapatan dan belanja termasuk oleh legislatif;
 - b) Distribusi dan rekrutmen SDM belum mengedepankan aspek fleksibilitas dengan mempertimbangkan kajian kebutuhan BLUD;
 - c) Belum maksimalnya peran bagian ekonomi sebagai Pembina BLUD sesuai amanat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota;
 - d) Belum maksimalnya peran instansi Pembina Teknis dalam mendukung Pengelolaan BLUD;
 - e) Penentuan komposisi dewan pegawai dengan mempertimbangkan kebijakan kepala Daerah dan tidak memperhatikan arahan regulasi Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
11. Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat temuan berulang.
12. Masih terdapat kabupaten yang tidak menaati tahapan dan jadwal persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten TTS.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu :

- 1. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan data LRA, data Penyertaan Modal, Dokumen Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Dokumen Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, System Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja. data RKP DBH-CHT dan laporan realisasi DBH-CHT dan serta



data lainnya agar menyampaikan tepat waktu setiap bulan, triwulan semesteran dan tahunan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whats APP maupun dihubungi secara langsung.

2. Koordinasi, konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kabupaten/kota tetap dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTT guna penyiapan secara baik SIPD RI terkait pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban.
3. Menjadi catatan untuk diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Menjadi bahan pembinaan dalam penganggaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan konsolidasi yang insentif dengan Pemerintah dan stakeholders dalam rangka meningkatkan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah karena dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman ASN pengelola DBH-CHT di Kabupaten/Kota dapat menjawab permasalahan pokok pengelolaan dan Pemanfaatan DBH-CHT:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan pemanfaatan DBH-CHT melalui FGD, bimtek, Diklat rapat koordinasi dll;
 - b) Penguatan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan DBH-CHT melalui konsistensi terhadap penempatan ASN pengelola DBH-CHT;
 - c) Membangun pola koordinasi secara insentif serta kooperatif dengan Pemerintah Pusat, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT.
7. Dengan pelaksanaan FGD pengelolaan keuangan BLUD maka pemahaman ASN pengelola keuangan BLUD di Kabupaten/Kota dapat menjawab permasalahan pokok pengelolaan keuangan BLUD yakni:
 - a) Penguatan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BLUD sebagai tujuan pelayanan kepada masyarakat melalui rapat koordinasi dan sosialisasi terkait BLUD bersama OPD yang berhubungan langsung dengan BLUD dan pihak legislatif (komisi yang membidangi) dalam rangka



- mendapatkan pengetahuan dan kesepahaman yang sama tentang BLUD dan pengelolaan BLUD;
- b) Mengupayakan dan mendorong terwujudnya perjanjian kerjasama antara BLUD dengan mitra dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan BLUD;
 - c) Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah agar dalam penempatan SDM pengelola BLUD mengedepankan kebutuhan dan profesionalisme;
 - d) mengupayakan dan mendorong pelaksanaan azas fleksibilitas BLUD dapat dijalankan secara proporsional dengan merujuk pada regulasi melalui peningkatan peran bagian ekonomi sebagai Pembina BLUD;
 - e) mendorong mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam instansi teknis agar mengakomodir proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran BLUD;
 - f) Secara berkelanjutan memberikan penguatan fungsi BLUD baik melalui dukungan APBD maupun dukungan kebijakan lainnya dalam rangka optimalisasi kinerja BLUD.
8. Melakukan pembinaan dan pendampingan/coaching clinic kepada kabupaten/kota melalui bimtek, workshop tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai kondisi dan ketersediaan anggaran.
9. Perlu adanya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota terkait perhitungan kemampuan keuangan daerah, bagi hasil pajak, dll.
10. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait penyusunan RAPBD induk, perubahan dan pertanggungjawaban sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Kabupaten Kabupaten TTS dan Kabupaten Manggarai Barat dengan masing-masing surat Nomor: 913/2056/BKUD5.2/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Perubahan APBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Bupati TTS dan Surat Nomor Nomor: 067/2237/BKUD5.1/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 Hal penjelasan terkait permohonan evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kab Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat.



c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Penggunaan Aplikasi Cash Management System (CMS) Pada Organisasi Perangkat Daerah Belum Maksimal.
2. OPD terlambat mengajukan SPP/SPM LS Barang dan Jasa di akhir tahun.
3. Terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana berupa Komputer dan Printer
5. Kurangnya Tenaga PNS.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu :

1. Pada awal Tahun Anggaran 2024 seluruh OPD sudah bisa menggunakan Aplikasi Cash Management System (CMS).
2. Menjadi catatan agar tidak terjadi lagi di tahun anggaran berikutnya.
3. Menjadi catatan dan tidak terjadi lagi pada tahun anggaran berikutnya
4. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk segera tambahkan Komputer dan printer
5. Dapat ditambahkan tenaga PNS untuk Bidang Perbendaharaan

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tidak memiliki kendala. Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Output kegiatan diselesaikan lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi yaitu proses surat menyurat terkait BTT seringkali mengalami keterlambatan.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah teknis lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

f. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi yaitu penginputan Standar Harga berkendala dalam sistem dan item tidak tersedia didalam sistem saat diinput oleh SKPD.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu setiap Perangkat Daerah diminta mengusulkan Standar Harga yang tidak ada dalam sistem dengan memberikan hasil surveinya.



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya semakin tinggi.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 2 (dua) yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI	760.988.379.960,00	747.512.448.116	98,23%	1,77%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.014.276.952,00	13.312.945.336	95,00%	5,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.435.900,00	206.511.700,00	94,98%	5,02%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.832.400,00	99,44%	0,56%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800,00	60.292.000,00	99,90%	0,10%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000,00	77.833.700,00	99,21%	0,79%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.629.100,00	38.553.600,00	79,28%	20,72%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.354.756.600,00	7.729.393.983,00	92,51%	7,49%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.178.762.000,00	5.569.375.183,00	90,14%	9,86%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.996.831.600,00	1.986.393.000,00	99,48%	0,52%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000,00	113.649.000,00	95,37%	4,63%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000,00	29.992.300,00	99,97%	0,03%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	29.984.500,00	99,95%	0,05%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.863.000,00	97,26%	2,74%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	4.863.000,00	97,26%	2,74%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.473.000,00	93.391.100,00	99,91%	0,09%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000,00	93.391.100,00	99,91%	0,09%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.083.016.192,00	1.063.444.534,00	98,19%	1,81%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.085.880,00	180.080.400,00	99,997%	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.450.200,00	57.980.000,00	82,30%	17,70%
	Penyediaan Bahan/Material	192.606.600,00	192.389.647,00	99,89%	0,11%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	274.873.512,00	274.434.512,00	99,84%	0,16%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.000.000,00	358.559.975,00	98,24%	1,76%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.764.400,00	120.222.811,00	99,55%	0,45%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.764.400,00	120.222.811,00	99,55%	0,45%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.831.375.860,00	3.786.867.560,00	98,84%	1,16%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400,00	17.580.600,00	48,08%	51,92%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.044.810.460,00	3.019.286.960,00	99,16%	0,84%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.455.000,00	308.250.648,00	99,93%	0,07%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.820.000,00	261.775.648,00	99,98%	0,02%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.635.000,00	46.475.000,00	99,66%	0,34%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	745.535.766.688,00	732.833.804.405,00	98,30%	1,70%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.200.234.333,00	8.744.406.704,00	95,05%	4,95%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	329.661.100,00	324.895.281,00	98,55%	1,45%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	449.915.500,00	447.061.444,00	99,37%	0,63%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	221.362.800,00	221.293.060,00	99,97%	0,03%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	168.051.100,00	159.984.600,00	95,20%	4,80%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.527.033.500,00	3.211.739.345,00	91,06%	8,94%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.916.490.800,00	2.896.585.170,00	99,32%	0,68%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.587.719.533,00	1.482.847.804,00	93,39%	6,61%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.383.524.700,00	2.340.693.226,00	98,20%	1,80%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	548.501.900,00	538.108.418,00	98,11%	1,89%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	486.866.900,00	486.547.270,00	99,93%	0,07%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	489.866.400,00	486.110.280,00	99,23%	0,77%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	754.797.000,00	736.612.616,00	97,59%	2,41%
	Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	78.492.500,00	69.547.642,00	88,60%	11,40%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik	25.000.000,00	23.767.000,00	95,07%	4,93%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Keuangan Pemerintah Daerah				
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.907.327.688,00	1.882.523.498,00	98,70%	1,30%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500,00	454.350.100,00	99,66%	0,34%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100,00	243.275.280,00	99,84%	0,16%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696,00	375.200.600,00	97,49%	2,51%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	226.999.696,00	219.658.873,00	96,77%	3,23%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696,00	590.038.645,00	99,02%	0,98%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.652.178.702,00	2.581.978.397,00	97,35%	2,65%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	95.680.000,00	95.676.000,00	99,996%	0,00%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	484.776.602,00	467.960.920,00	96,53%	3,47%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.071.722.100,00	2.018.341.477,00	97,42%	2,58%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	729.392.501.265,00	717.284.202.580,00	98,34%	1,66%
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah	63.374.211.388,00	62.884.046.386,00	99,23%	0,77%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.424.756.000,00	-	0,00%	100,00%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.055.939.527,00	882.798.125,00	7,98%	92,02%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61%	-0,61%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.438.336.320,00	1.365.698.375,00	94,95%	5,05%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.438.336.320,00	1.365.698.375,00	94,95%	5,05%
	Penyusunan Standar Harga	1.438.336.320,00	1.365.698.375,00	94,95%	5,05%

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan surveillance I dan surveillance II SMM ISO 9001:2015, penggunaan tenaga ahli/narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan instansi vertikal terkait sebagai pemateri, tim penyusun, dan pemberi masukan dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan daerah dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun SIPD-RI, serta kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian penetapan kinerja dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :



- Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan Badan Keuangan Daerah.
- Tersusunnya LKIP Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Tersusunnya RKA Murni dan Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya RAK Murni dan Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diinput pada aplikasi SIPD (penatausahaan).
- Tersusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya Renja Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026
- Tersusunnya Rencana Aksi Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2023,
- Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.
- Tersusunnya Peta Proses Bisnis dan GAP-GBS Badan Keuangan Daerah.

2) Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :



- Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.
 - Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Verifikasi SPJ pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
 - Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
 - Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
 - Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
 - Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 99,91% dengan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
 - Terlaksananya Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
 - Penyelesaian Dokumen Pensiun.
 - Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 98,19% dengan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material,



Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Tersedianya Bahan/Material.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan daerah baik di tingkat pusat maupun daerah.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 99,55% dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Komputer.
- Pengadaan Printer.
- Pengadaan Laptop.
- Pengadaan Hardware Infrastruktur, Software dan Peralatan Mainframe.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 98,84% dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 99,93% dengan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun output pelaksanaan kegiatan untuk tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 73,31%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah



Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar 95,05%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen.
- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen.
- Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 39 Dokumen.
- Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 39 Dokumen.
- Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen.
- Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 Dokumen.
- Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 1 Dokumen.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Proses Stemple dan Pembagian Dokumen Murni DPA-SKPD TA. 2023.
2. Rapat dalam rangka penyerahan DPA SKPD.
3. Penetapan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
5. Penetapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
6. Penetapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
7. Penetapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
8. Rapat terkait Pembahasan Permohonan Penggunaan Dana Biaya Tak Terduga.



9. Rapat terkait Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
10. Rapat terkait Pembahasan Detail/Rincian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
11. Rapat terkait Pembahasan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
12. Rapat terkait Pembahasan Permohonan Penggunaan Anggran Melampaui Tahun Anggaran.
13. Rapat terkait Pembahasan pengelolaan Dana Alokasi Umum untuk melakukan Finalisasi terhadap rincian alokasi maupun jadwal pelaksanaan.
14. Rapat terkait TPP ASN Tahun Anggaran 2023.
15. Rapat Secara Daring Pelaksanakan Kegiatan Peyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2024.
16. Rapat terkait Pembahasan Tagihan Angkutan Penyeberangan dan Permohonan Penggunaan Dana BTT.
17. Rapat terkait Pembahasan Permohonan Pengguguran Tanda Bintang pada DPA TA. 2023 dan Pembahasan Tagihan Biaya Pelayanan Pasien Dana Pengaman Provinsi/SKTM.
18. Rapat terkait Pembahasan Rencana Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
19. Rapat terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
20. Rapat terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023.
21. Melakukan Survey Harga Barang dan Jasa di 21 Kabupaten/Kota.
22. Melaksanakan penginputan Survey Harga Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Rapat terkait Penyusunan Dokumen Standar Harga Barang Dan Jasa Provinsi NTT Tahun 2024.
24. Rapat terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan Tahap I DAU Spesifik Grant.



25. Undangan Rapat terkait Pembahasan Permohonan Usulan Penambahan Anggaran.
26. Melakukan Survey Harga Satuan Biaya Umum Wilaya Kota Kupang.
27. Melaksanakan penginputan Survey Harga Barang Jasa dan Harga Satuan Biaya Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
28. Rapat terkait Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Survey Tahap I dan Rencana Survey Tahap ke II.
29. Proses Pembagian Dokumen Perubahan II DPA-SKPD TA. 2023.
30. Rapat terkait Pembahasan Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2023.
31. Rapat terkait Tindak Lanjut Hasil Review Inspektorat Terhadap Pembiayaan Kegiatan Hari Lahir Pancasila Di Kabupaten Ende Tahun 2022 Oleh Bank NTT.
32. Rapat Terkait Pembahasan Usulan Proposal Bantuan Dana dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi NTT Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
33. Rapat Terkait Pembahasan Permohonan Pergeseran Anggaran dan Penambahan Anggaran.
34. Rapat Terkait Pembahasan Lanjutan rincian Usulan Permintaan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bantuan dana Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
35. Melaksanakan penginputan Survey Harga Barang Jasa dan Harga Satuan Biaya Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36. Proses Penandatanganan, Pencetakan dan Pembagian Dokumen Perubahan III DPA-SKPD TA. 2023.
37. Rapat terkait Pembahasan Perihal Penyesuaian Biaya Kontribusi Pelatihan pada SIPD Tahun Anggaran 2023.
38. Rapat terkait Pembahasan evaluasi Progres Pelaksanaan Tahap I.
39. Rapat terkait Penyampaian Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023
40. Rapat terkait Pembahasan Laporan Realisasi Penggunaan DAU Spesific Grant Tahap I.
41. Rapat terkait Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.



42. Rapat terkait Penyampaian Masukan Komisi-Komisi kepada Bidang Anggaran terkait Dengan Program dan Kegiatan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.
43. Rapat terkait Pembahasan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT.
44. Melaksanakan penginputan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT.
45. Rapat terkait Pembahasan Perihal Usulan Rincian APBD Perubahan Tahun 2023.
46. Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran.
47. Rapat terkait Pembahasan evaluasi Progres Pelaksanaan DAU specific Grant Tahap I dan Rencana Pelaksanaan Tahap II.
48. Rapat terkait Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
49. Rapat terkait Penyampaian Masukan Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran terkait dengan Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
50. Rapat terkait Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD.
51. Rapat terkait Pembahasan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT.
52. Proses Percetakan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.
53. Proses Percetakan Keputusan Gubernur Nomor 255/KEP/HK/2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
54. Rapat Terkait Pembahasan Perihal Persiapan Penyusunan RAPBD TA. 2024.
55. Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap I Dan Tahap II Serta Rencana Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tahap II.
56. Rapat Terkait Pembahasan Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun 2024.
57. Rapat Terkait Pembahasan Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Paddock Besipae.



58. Rapat Terkait Konsultasi Banggar Ke Komisi Terkait Dengan Program Kegiatan Dalam Rancangan PPAS TA. 2024.
59. Rapat Terkait Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD TA. 2024.
60. Rapat Paripurna Terkait Pembahasan Dan Penetapan Keputusan DPRD Terhadap Rancangan KUA Dan PPAS APBD TA. 2024.
61. Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang KUA-PPAS APBD TA. 2024.
62. Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2023.
63. Rapat Paripurna Terkait Pembahasan Dan Penetapan Keputusan DPRD Terhadap Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS APBD TA. 2023.
64. Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2024.
65. Rapat Terkait Konsultasi Banggar Ke Komisi Terkait Dengan Program Kegiatan Dalam Rancangan PPAS TA. 2023.
66. Rapat Terkait Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD TA. 2023.
67. Proses Percetakan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024.
68. Proses Percetakan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
69. Rapat Terkait Pembahasan Perubahan Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun 2023.
70. Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap I Dan Tahap II Serta Rencana Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tahap II.
71. Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA. 2023.
72. Proses Percetakan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
73. Proses Percetakan Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.



74. Proses Percetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
75. Proses Percetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
76. Proses Percetakan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT atas Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
77. Proses Percetakan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
78. Proses Percetakan Ringkasan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
79. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA. 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2023 di Kementrian Dalam Negeri.
80. Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD TA. 2024.
81. Proses Percetakan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024.
82. Proses Percetakan Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024.
83. Proses Percetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTT TA. 2024.
84. Proses Percetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2024.
85. Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD TA. 2024.
86. Rapat Paripurna Terkait penetapan perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2023.
87. Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Perubahan KUA-PPAS TA. 2023.
88. Proses Percetakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023.
89. Proses Percetakan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Penambahan Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan PPAS yang tidak Terdapat dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT TA. 2023.



90. Proses Percetakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024.
91. Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap II Dan Rencana Pelaksanaan Tahap III.
92. Rapat Terkait Evaluasi Pembayaran TPP Semester I dan Rencana Verifikasi Dokumen TPP Semester II.
93. Proses Percetakan Dokumen Tanggapan Pejabat Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024.
94. Rapat Paripurna Terkait Tanggapan Pejabat Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024.
95. Proses Tanda Tangan dan Pencetakan Dokumen Perubahan DPA Reguler SKPD TA. 2023.
96. Rapat Terkait Kekurangan Dana Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.
97. Rapat Terkait Kondisi Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT Pasca Gempa Bumi
98. Rapat Terkait Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Tim TPP dan Rencana Penyampaian Laporan Penganggaran TPP TA. 2024 ke Kementerian Dalam Negeri.
99. Pelaksanaan Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD TA. 2024 di Kementerian Dalam Negeri RI.
100. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2024 di Kementerian Dalam Negeri.
101. Proses Stempel dan Pembagian Dokumen Perubahan DPA Reguler SKPD TA. 2023.
102. Rapat terkait Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI Terhadap Perda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023 dan Pergub Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023.
103. Proses Percetakan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
104. Proses Percetakan Dokumen Peraturan Gubernur NTT Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.



105. Rapat terkait Pembahasan Rencana Kerja Anggaran yang Bersumber dari DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum.
106. Rapat Paripurna terkait Pembahasan Penyampaian Tanggapan Pj. Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2024.
107. Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan APBD TA. 2024.
108. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan .
109. Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023.
110. Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023.
111. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023.
112. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023.
113. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023.
114. Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023.
115. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023.
116. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023.
117. Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023.
118. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023.
119. Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023.



120. Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023.
 121. Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Murni).
 122. Penetapan Dokumen Keputusan Gubernur Nomor 239/KEP/HK/2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Murni).
 123. Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Perubahan).
 124. Penetapan Dokumen Keputusan Gubernur Nomor 439/KEP/HK/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 239/KEP/HK/2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023.
 125. Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 57E Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023.
 126. Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 57D Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja.
 127. Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD NTT.
 128. Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2023 Tentang Standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD NTT.
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Capaian kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,20%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
- Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota akhir 31 setiap bulan pada tahun 2023 dengan capaian kinerja output tersedianya data LRA 22 Kabupaten/Kota. Data LRA tersebut juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Bank Indonesia.
 - Melaksanakan sanding banding hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan APBD 2023 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu)



dokumen sanding banding hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Inventarisir Tindak Lanjut Evaluasi RAPBD 22 Kab/Kota dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen hasil tindak lanjut evaluasi RAPBD 22 kab/kota Tahun Anggaran 2023.
- Rekapitulasi Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) kab/kota dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) laporan Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) 22 kab/kota Tahun Anggaran 2023.
- Rekapitulasi regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah berupa 1 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Kepala Daerah dengan capaian kinerja output terinventarisir data regulasi penetapan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 Peraturan Kepala Daerah. Informasi yang telah tersedia berjumlah 7 (tujuh) dokumen dari 7 Kabupaten, yakni: Kabupaten TTS, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Ngada, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten TTU serta Daerah lainnya yang akan terus diminta.
- Rapat koordinasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia terkait pengendalian inflasi dengan mekanisme penyampaian materi dan diskusi dengan capaian kinerja output adanya informasi terkait pengendalian inflasi dari sudut pandang tata kelola pengelolaan keuangan daerah di Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan secara tertib yang ditinjau dari struktur APBD.
- FGD analisis ekonomi regional, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan kas pemerintah pusat dan monitoring dan evaluasi penyaluran DAK fisik dan dana desa TA 2022 dengan capaian kinerja output terinformasinya materi terkait Perencanaan dan pengelolaan keuangan 22 kabupaten/kota, Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan 31 Desember 2022, permasalahan umum penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022 dan rekomendasi serta upaya yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022.
- Rekapitulasi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Tahun Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) laporan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.



- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi NTT (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT) dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi NTT (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT).
- Mengikuti sosialisasi dari DJP pajak tentang validasi dari NPWP ke NIK dengan capaian kinerja output Adanya informasi terkait validasi dari NPWP ke NIK dari DJP pajak yang diikuti oleh ASN Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- Inventarisir laporan DBH-CHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 Tersedianya 1 (satu) laporan DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota.
- Inventarisir data penganggaran penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 dan data realisasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja output adanya informasi terkait data penganggaran penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 dan data realisasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2022 Kabupaten/Kota pada Bank NTT dan BUMD lainnya.
- Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta, Inspektur Daerah Provinsi NTT dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi NTT dengan capaian kinerja output terinformasinya hasil evaluasi APBD 22 Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- Rekapitulasi data penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun 2024 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) laporan penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten/Kota.
- Penyampaian laporan Realisasi Penggunaan DBH-CHT Semester II TA 2022 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI di Jakarta dengan capaian kinerja output terinformasinya 1 (satu) laporan Realisasi Penggunaan DBH-CHT Semester II TA 2022 kab/kota.
- Rekapitulasi data BLUD kab/kota TA 2023 dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) laporan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2023.
- Pelaksanaan FGD pengelolaan BLUD secara daring/virtual/zoom meeting dengan pemerintah kabupaten/kota dengan capaian kinerja output hadirnya



para peserta dari 22 Kabupaten/Kota pada FGD/BLUD antara lain Kepala Badan Keuangan Daerah/PPKD Kabupaten/Kota, Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang Anggaran/Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah/PPKAD, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pejabat pengelola BLUD yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.

- Pembentukan tim pengendali pelaksanaan bantuan keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/77/BKUD5/2023 Tanggal 1 Maret 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- Pelaksanaan rekonsiliasi Rancangan Kegiatan Penganggaran DBH-CHT Tahun 2023 Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output tersusunnya RKP DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 sesuai PMK 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
- Rapat pembahasan skema perhitungan BANKEU dengan capaian kinerja output disepakatinya draft kebijakan/formulasi BANKEU Provinsi NTT yang termuat dalam 1 (satu) draft Naskah Dinas.
- Mengikuti FGD terkait Penatausahaan barang milik daerah dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen penyampaian materi yang disampaikan oleh kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota terkait perbandingan LHP BPK Tahun 2020 dan Tahun 2021 Rekapitulasi temuan BPK atas laporan keuangan kab/kota se-NTT Tahun Anggaran 2021.
- Rapat koordinasi dan konsultasi dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penganggaran dan pelaporan jasa pelayanan nakes tentang covid-19 kabupaten Flores Timur dengan capaian kinerja output adanya kesepakatan terkait:
 - a. Dana transfer yang masuk ke kas daerah bukan merupakan retribusi sehingga dialokasikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. Retribusi daerah ditetapkan dengan Perda;



- c. Jasa pelayanan nakes merupakan bagian dari piutang yang akan dicatat pada LRA RSUD kab. Flotim dan dikonsolidasikan dalam LRA Kabupaten Flotim;
 - d. Salah satu rekomendasi dari BPK yakni agar dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Rapat koordinasi dan konsultasi dengan dengan DPRD kabupaten Sabu Raijua terkait Penganggaran program/kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output terinformasinya DAU yang dialokasi terdiri atas 2 skema yakni:
- a. Skema *specific grand* dan *block grand*;
 - b. *Specific grand* di merupakan DAU yang diperuntukan hanya pada bagian: penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum sedangkan untuk *block grand* Penggunaan diserahkan menurut kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah;
- Pada Tahun Anggaran 2023 kabupaten Sabu Raijua *mendapat insentif fiskal* yang berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal ini diberikan pada daerah yang berkinerja baik atau daerah tertinggal.
- Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output terinformasinya terkait rencana kegiatan perbidang dan adanya informasi terkait RENSTRA Badan keuangan Daerah Provinsi NTT.
- Sosialisasi TPP terkait Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan capaian kinerja output adanya informasi dan petunjuk terkait TTP berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.



- Pelaksanaan rekonsiliasi sisa DBH-CHT TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota secara *virtual zoom meeting* narasumber dari Kemenkeu RI dengan capaian kinerja output adanya informasi dan penyesuaian data sisa DBH-CHT TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota seperti: nomenklatur kegiatan, pagu anggaran, jenis satuan, realisasi dan nama pejabat penandatanganan berita acara pada 22 kabupaten/kota yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
- Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan penyusunan APBD dalam rangka evaluasi RAPBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja output terselenggaranya rapat koordinasi persiapan penyusunan APBD dalam rangka evaluasi RAPBD kabupaten/kota TA 2024 dengan dihadiri lebih kurang 100 orang terdiri dari panitia penyelenggara dan peserta rapat yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
- Rekapitulasi data Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dari Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota.
- Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/50/BKUD5/2023 Tanggal 1 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output adanya informasi yang termuat dalam 1 (satu) dokumen terkait:
 - a. Reformasi kebijakan pemberian DAU baik specific Grant maupun Block Grant;
 - b. Optimalisasi Peran SIPD dalam mendukung system digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik;
 - c. Diskusi kelompok terkait permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawab serta pengelolaan asset daerah;
 - d. Peninjauan lapangan dalam kaitan dengan upaya peningkatan PAD;



- e. Perencanaan dan penetapan kabupaten yang menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 di Kabupaten Rote Ndao. Dihadiri peserta Rakor dari Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab Manggarai Timur, Kab. Ngada, Kab. Nagekeo, Kab. Sikka, Kab. Flotim, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Sabu Raijua, Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Belu, Kab. Malaka dan Kab. Rote Ndao dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Bank NTT.
- Rapat koordinasi terkait surat bupati Belu Nomor 005/1182/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 hal Undangan. Rapat tersebut dihadiri oleh bersama pejabat yang mewakili Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output adanya informasi dan kesepakatan rapat yang dituangkan dalam 1 (satu) laporan notulensi rapat sebagai informasi dalam menjawab surat Bupati Belu.
 - Rapat koordinasi terkait Bidang Penegakkan Hukum bersama Dinas Perindag Provinsi NTT, Bea Cukai, Satpol PP Provinsi NTT, Satpol PP Kota Kupang dan Satpol PP Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output adanya informasi dan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan operasi bersama cukai rokok ilegal.
 - Rapat koordinasi dengan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Surat Bupati Sumba Barat Nomor P.495/BKAD/53.12/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Hal Permohonan Rekomendasi tentang Pendanaan Pemilukada Tahun 2024 dengan capaian kinerja output adanya informasi dan kesepakatan terkait item pendanaan pemilukada pada KPU, BAWASLU dan Kepolisian Resort Sumba Barat.
 - Rapat koordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTT Keadaan: Sampai dengan Mei 2023, dengan capaian kinerja output terinformasinya alokasi dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT serta diskusi terkait persoalan yang mengakibatkan realisasi rendah serta potensi pendapatan daerah di Provinsi NTT.



- Rapat sosialisasi tentang metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjawaban kabupaten/kota bagi seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output adanya informasi tentang metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjawaban kabupaten/kota bagi seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output 1 (satu) Naskah Dinas terkait Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/123/BKUD5/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023.
- Sosialisasi dan operasi bersama penegakan hukum Cukai Rokok Ilegal di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output adanya sosialisasi dan operasi bersama dilaksanakan di wilayah Kota Kupang pada 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kota Kupang yakni: Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Alak. Untuk Wilayah Kabupaten Kupang di 3 (tiga) wilayah yakni: Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan Taebenu yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
- Rapat terkait Penganggaran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan capaian kinerja output adanya informasi dalam rangka persetujuan kerja sama terkait Penganggaran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Pemilihan Umum Serentak Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kab/Kota Tahun 2024.
- Rapat koordinasi kesiapan penganggaran pemilukada serentak Tahun 2024, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilukada dan optimalisasi PAD dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab terkait kesiapan penganggaran pemilukada serentak Tahun 2024, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara



Pemilukada dan Optimaslisasi PAD kepada Kabupaten/Kota serta adanya laporan kegiatan.

- Rapat terkait pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output terinformasinya persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Kupang dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan merekapitulasi seluruh sumber pendanaan untuk pajak yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kupang dan syarat pencairan pendanaan dilakukan apabila telah disampaikan bukti setoran kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Rapat terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bersama pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dengan capaian kinerja output penyamaan persepsi terkait program/kegiatan prioritas nasional dan daerah yang menjadi *input* dalam pelaksanaan evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun program/kegiatan yang menjadi prioritas yakni: Pendanaan Pemilukada, stunting, TJPS dan kemiskinan ekstrem.
- Rekapitulasi temuan dan rekomendasi BPK atas LKPD Kab/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen berupa temuan dan rekomendasi BPK atas LKPD Kab/Kota Tahun Anggaran 2022 sesuai kebutuhan untuk FGD maupun informasi lain yang dibutuhkan.
- Laporan Konsolidasi Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester 1 Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI dengan capaian kinerja output terinformasinya 1 (satu) Laporan Konsolidasi Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester 1 Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI.
- Rekapitulasi Barang Inventaris di Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen Barang Inventaris di Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota.
- Rapat konsultasi dari Kabupaten Kupang terkait Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja output adanya



persamaan persepsi terkait pendanaan Pemilukada Serentak Tahun Anggaran 2024 yakni:

- a. Standar honor, Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Tunjangan Kematian KPU dan BAWASLU ditentukan sesuai SK Gubernur NTT, Pendanaan TNI dan Polri disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan daerah dan Standar harga daerah masing-masing.
 - b. Pencairan pendanaan melalui 2 (dua) tahap yakni: Pendanaan sekaligus Pendanaan secara bertahap tahap 1 (40%) dan tahap ke II (60%) sesuai Permendagri 54 Tahun 2019 dan Perubahannya Permendagri 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pemilu Kepala Daerah yang bersumber dari APBD.
- Rapat International Standardization Organization (ISO) dengan capaian kinerja output penilaian dari Tim ISO antara lain: Komitmen untuk pelaksanaan ISO sangat baik, Operasional pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP, Sistem manajemen mutu seperti rapat evaluasi triwulan, audit internal, laporan bulanan tetap dilaksanakan dengan baik.
- Rapat Koordinasi bersama SKALA (Kemitraan antara Australia-Indonesia yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) dengan capaian kinerja output area focus yang menjadi bahan koordinasi yakni:
- a. Dukungan penguatan kapasitas dan tata cara pengalokasian anggaran daerah untuk penerapan layanan dasar yang inklusif dan berkualitas;
 - b. Dukungan peningkatan penerapan SPM untuk memastikan dampak belanja terhadap ketersediaan layanan dasar yang inklusif dan berkualitas;
 - c. Kajian terhadap potensi PAD dan sumber-sumber pembiayaan daerah.
- Rapat Koordinasi tentang Pendanaan DAU Spesific Grand di Yogyakarta sesuai undangan Nomor: UND-211/PK.2/2023 Hal Kegiatan Rapid Assesment Kebijakan DAU yang ditentukan Penggunaannya dengan capaian kinerja output adanya informasi penting yang diterima dalam kaitan dengan Revisi PMK 212/PMK/2023 yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024.
- Rekapitulasi data Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024 dengan capaian kinerja output adanya 1



(satu) Naskah Dinas terkait Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024 dari 22 kab/kota.

- Lokakarya Rencana Implementasi Bantuan Keuangan Provinsi NTT sekaligus Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output terinformasinya Rencana Implementasi Bantuan Keuangan Provinsi NTT dan tersosialisasinya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi dan penegakan hukum cukai rokok ilegal di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output sosialisasi di wilayah Kota Kupang Jalan Hr Koroh Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana, di wilayah Airnona dan Bakunase. Di wilayah Kabupaten Kupang sosialisasi disepanjang Jalan Timor Raya dan Oesu'u Kecamatan Kupang Timur dan Amarasi di Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat serta dilakukan penindakan dengan penyitaan sejumlah rokok ilegal pada 2 (dua) wilayah tersebut yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
- Rapat International Standardization Organization (ISO) dengan capaian kinerja output memperkenalkan sistem manajemen keamanan data pada instansi (SMKI). Manfaat utama ISO 27001 yakni untuk melindungi dan mempertahankan keamanan informasi yang terdiri dari aspek Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas) dan Availability (Ketersediaan).
- Workshop integrasi pengelolaan keuangan berbasis elektronik (SAKTI) bagi Satker Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada hari Kamis, 7 September 2023 di The Jayakarta Suites Komodo Flores Labuan Bajo dengan capaian kinerja output adanya informasi yang diperoleh yakni:
 - a. Reformulasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) TA 2023, Digipay yang merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan;
 - b. Mekanisme penatausahaan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
 - c. Tips untuk mendapatkan nilai IKPA optimal.



- Rapat monitoring penyelenggara SPM kab/kota terkait Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (GWPP) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 September 2023 di hotel Sotis Kupang dengan capaian kinerja output penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian targetnya melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Pemda menuangkan target tahunan rencana pencapaian SPM dalam KUA PPAS, dan RKA SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Nota kesepakatan tentang KUA PPAS yang telah disepakati antar Kepala daerah dan DPRD wajib memuat pencapaian dan penerapan SPM;
 - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM yang dilakukan.
- FGD dengan Bank Indonesia terkait pencapaian realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan capaian kinerja output terinformasinya data realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan sampai dengan bulan Agustus 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota.
- Konsultasi teknis dari Pemerintah Kabupaten TTS terkait Pengelolaan keuangan daerah dengan capaian kinerja output terinformasinya pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD.
- FGD terkait mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan capaian kinerja output mendapatkan informasi terkait tips mempertahankan opini BPK terhadap LKPD.
- Rapat terkait draft Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah dengan capaian kinerja output area focus yang menjadi bahan diskusi yakni:
 - a. Batang tubuh Pergub tentang Inovasi Daerah;
 - b. Substansi/muatan materi terkait kelembagaan dan keuangan;
 - c. Draft pergub inovasi daerah dicermati dari aspek hukum yakni konsideran dan tata bahasa hukum.
- Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja output terinformasinya laporan Pelaksanaan



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi NTT dan inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Konsultasi secara virtual antara pemerintah kabupaten Manggarai Barat dengan Kemendagri terkait mekanisme penyusunan Perubahan APBD tahun 2023 dengan perubahan peraturan kepala daerah di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan capaian kinerja output terinformasinya tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan RAPBD dan mekanisme teknis penyusunan Perubahan RAPBD TA 2023 dan komponen yang termuat didalam Perubahan APBD, Likuiditas kas, serta penegasan dari kemendagri bahwa tidak adanya perubahan APBD dengan perda namun alokasi anggaran untuk pelayanan publik/ pelayanan dasar harus tetap diakomodir didalam perubahan APBD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rapat dengan DJPK terkait senengi Bagan Akun Standar antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja output adanya informasi dari DJPK terkait intervensi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang bersifat tematik dan spesifik untuk mencapai target tertentu.
- Rapat Konsultasi dari DPRD Kabupaten TTS terkait persoalan keterlambatan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output terinformasinya komponen yang termuat didalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialokasikan anggaran sesuai peraturan perundangan, yakni penambahan pada pendapatan transfer seperti dana insentif daerah dan dana desa. Selain itu, dialokasikan anggaran sesuai dengan specific grant, kegiatan prioritas seperti pemilukada dan kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan serta program kegiatan yang bersifat wajib, mengikat, darurat dan mendesak.
- Rapat komite ALCo Regional Provinsi NTT periode realisasi sampai dengan 30 September 2023 dengan capaian kinerja output adanya informasi terkait pengelolaan asset dan kewajiban, ketersediaan kas. Selain itu Alco sebagai wadah yang mempunyai peranan terhadap kondisi makro ekonomi. pemerintah



daerah diminta untuk dapat berinovasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

- Kegiatan advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan dalam mendukung UHC dan kemitraan penanganan penyakit prioritas dengan capaian kinerja ouput terinformasinya materi terkait pemanfaatan dana cukai rokok untuk pembiayaan kesehatan di daerah kab/kota.
- Rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi zoom meeting antara PJ. Gubernur NTT dan dan Para Bupati/Pj Bupati se- NTT terkait percepatan penandatanganan NPHD pendanaan kegiatan pemilukada tahun 2024 kepada Lembaga Penerima Hibah Daerah yakni KPU dan Bawaslu sesuai SE Mendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang percepatan penandatanganan NPHD pendanaan pemilukada Tahun 2024 dengan capaian kinerja ouput terinformasinya kesiapan kab/kota terkait percepatan penandatanganan NPHD pendanaan kegiatan pemilukada tahun 2024.
- Pelaksanaan Penandatanganan NPHD Pendanaan Pemilukada bersama antara Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja ouput tersedianya 23 (dua puluh tiga) dokumen NPHD pendanaan pemilukada yang telah di ditandatangani secara bersama oleh Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota.
- Laporan Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Penyelenggara Pilkada Tahun 2024 Nomor 067/2404/BKUD5.2/2023 Tanggal 16 November 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI C.q Dirjen bina Keuangan Daerah di Jakarta dengan capaian kinerja ouput terinformasi kesiapan dan kondisi yang terjadi dalam proses penandatanganan NPHD antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Penyelenggara Pilkada Tahun 2024.
- Penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja ouput adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar bagi Kab/Kota untuk mempersiapkan alokasi anggaran pada RKP DBH-CHT 2024.



- Sosialisasi terkait public internet oleh PT Moratelindo dengan capaian kinerja output adanya informasi terkait public internet yang merupakan cabang dari Singapura yang telah terkoneksi pada 5 negara dengan aliran jaringan data pada wilayah Jawa dan Bali dan telah terlisensi.
- Rapat dengan Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Barat dalam rangka menukar informasi terkait DBH-CHT dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) dokumen pemaparan materi dan diskusi terkait DBH-CHT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rekapitulasi data statistik Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dan Konsep Database Statistik Keuangan Daerah TA. 2022 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen data statistik Kabupaten/Kota tahun 2022.

3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 98,70%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 2 Dokumen.
- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen.
- Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebanyak 4 Laporan.
- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebanyak 4 Laporan.
- Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas sebanyak 3 Laporan.

Pada Tahun Anggaran 2023 rincian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebagai berikut:

- Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.

Belanja Daerah	4.891	Doc
----------------	-------	-----

Terdiri Dari :

UP	33	Doc
----	----	-----



GU	411	Doc
TU	16	Doc
LS Gaji Induk	718	Doc
LS Gaji Susulan	62	Doc
LS Kekurangan Gaji	53	Doc
LS Gaji Terusan	153	Doc
LS Selisih Harga Beras	33	Doc
LS Gaji PPPK	541	Doc
LS Susulan Gaji PPPK	2	Doc
LS Gaji Ke-13 PPPK	48	Doc
LS Susulan Gaji Ke-13	2	Doc
LS THR PPPK	47	Doc
LS THR	64	Doc
LS Terusan THR	13	Doc
LS Terusan Gaji 13	11	Doc
LS Gaji Ke-13	59	Doc
LS TPP	663	Doc
LS Susulan TPP	10	Doc
LS Kekurangan TPP	1	Doc

➤ Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda, Duda dan Pindah).

SKPP Pindah	19
SKPP BUP	463
SKPP Meninggal	49
SKPP Diberhentikan	4
SKPP Pensiun Dini	1
Jumlah	536

➤ Menginput Perubahan Gaji Pada Aplikasi Gaji SIM Taspen

Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat:

PNS	5.496	Org
Guru	6.518	Org
PPPK Tahap 1	78	Org
PPPK Tahap 2	878	Org



- Memverifikasi dan Menginput KP4 PNS sebanyak 13.427 Orang
- Mengumpulkan, Membuat Rekap dan Memverifikasi Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Lingkup Pemerintah Prov. NTT Masa Pajak 2022. Pencetakan SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Aktif dan Pensiun Lingkup Pemprov. NTT untuk Masa Pajak 2022 sebanyak 15.570 orang
- Melakukan Pengiriman Laporan Realisasi Tahunan (LRT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022, Surat Pengantar : 067/177/BKUD3.3/2023, tanggal 24 Januari 2023.
- Membuat Laporan Bulanan (12 Laporan) sebagai salah satu persyaratan untuk penyaluran Dana DAU ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang :
 - a. Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)
- Pembayaran Gaji Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2023
 - a. Verifikasi berkas
 - b. Penginputan Perubahan Pegawai Pada Aplikasi SIM Gaji Taspen
 - c. Pencetakan Daftar Gaji
 - d. Pencetakan SP2D
 - e. Realisasi Pembayaran
- Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi Januari –Desember 2023

Penerimaan	68.260	Doc
Pengeluaran	4.891	Doc
- Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam Buku Kas Umum Daerah Januari-Desember 2023

Penerimaan	68.260	Doc
Penngeluaran	4.891	Doc
- Membuat Rekapitulasi Penerimaan dan pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, luran Kesehatan, luran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22 PNS pada 33 OPD dan 1 Anggota



Dewan, Lingkup Pemprov. NTT, OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK
Pengalihan 22 Kab/Kota

- Membuat rekapitulasi pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas daerah :

Bulan	Jumlah OPD	Bukti
Januari	17	17
Februari	17	17
Maret	17	17
April	17	17
Mei	17	17
Juni	16	16
Juli	16	16
Agustus	16	16
September	16	16
Oktober	16	16
November	16	15
Desember	16	15

- Melakukan verifikasi keabsahan dokumen terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan sebanyak 4891 Dokumen.
- Membuat Laporan dan Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Tahun 2023 ke KPP Pratama Kupang Januari – Desember 2023
- Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Tahun 2023 ke Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta dan Kepala KPPN Cabang Kupang Januari sampai dengan November 2023
- Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing: Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan Tahun 2023, Januari sampai Desember 2023
- Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras Tahun 2023 :

Bulan	Jumlah Setoran	Ket
Januari	34	PT. Flobamor
Februari	34	PT. Flobamor
Maret	34	PT. Flobamor
April	33	Bulog
Mei	33	Bulog



Juni	33	Bulog
Juli	33	Bulog
Agustus	33	Bulog
September	33	Bulog
Oktober	33	Bulog
November	33	Bulog
Desember	33	Bulog

- Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Desember 2023:
 - a. LHP BPK RI (29 kasus) Nominal Rp. 152.115.137,-
 - b. LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (750 kasus) Nominal Rp. 7.922.238.787,-.
- Membuat Buku Anggaran Kas dan SPD untuk Perda APBD dan Perubahan Perda APBD sebanyak 2 Buku untuk 33 SKPD yang terdiri dari : Perda APBD, dan Perubahan Perda.
- Pembuatan Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Masa Pajak 2022 , Pencetakan SPT Formulis 1721-A2 sebanyak 15.570 Orang
- Menerbitkan SP2D sebanyak 4.891 Dokumen SP2D Belanja Daerah
- Membuat Keputusan Gubernur Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor : 900/54/BKUD3/2023 Tanggal 03 Februari 2023
- Membuat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Besaran Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor 900/55/BKUD3/2023 Tanggal 03 Februari 2023
- Melakukan Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Januari sampai Desember 2023 dengan keadaan terakhir Desember 2023 terdapat 29 Kasus LHP BPK dan 750 Kasus LHP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 A/KEP/HK/ 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Besaran Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.



- Memverifikasi dan Menginput KP4 PNS sebanyak 13.427 Orang .
- Hasil temuan rekonsiliasi data KP4 Kelebihan Tunjangan Keluarga PNS Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp. 639.288.548,- belum termasuk guru-guru Kabupaten/Kota
- Hasil rekonsiliasi KP4 guru-guru di Kabupaten/Kota terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga baik suami/istri, anak. Bidang Perbendaharaan turun ke Kabupaten/Kota untuk bertemu guru-guru yang terdapat temuan agar bisa setor kembali dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan atau Penghasilan lainnya jika guru yang terdapat temuan belum bisa setor sekaligus.
- Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 345/KEP/HK/2023 Tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023.
- Membuat keputusan Gubernur Tentang: Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 900/388/BKUD3/2022 Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor 900/52/BKUD3.3/2023 Tanggal 2 Februari 2023
- Membuat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 04 April 2023.
- Membuat Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang : Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor 900/53/BKUD3.3/2023 Tanggal 3 Februari 2023.
- Membuat Surat Keputusan Gubernur Tentang Penunjukan Bendahara dan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Februari 2023



- Membuat Surat Keputusan Gubernur Tentang : Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/66/BKUD3/2023 Tanggal 14 Februari 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/388/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT TA 2023 nomor 900/84/BKUD3/2023 Tanggal 05 April 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/101/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/38/BKUD3/2023 Tanggal 05 April 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/100/BKUD3/2023 tentang penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rekening Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2023 Nomor 900/53/BKUD3/2023 Tanggal 05 April 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/1101/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/109/BKUD3/2023 Tanggal 23 Mei 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/1152/BKUD3/2023 tentang penetapan Pengelola Keuangan Dan Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah TA 2023 Nomor 900/111/BKUD3/2023 Tanggal 29 Mei 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur: 900/1151/BKUD3/2023 tentang Tim Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Aplikasi Cash Managemen System di Lingkungan Pemerintah Prov. NTT TA 2023 nomor 900/110/BKUD3/2023 Tanggal 29 Mei 2023



- Bidang Perbendaharaan sebagai narasumber dalam monitoring evaluasi DAK terkait mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK fisik Tahun Anggaran 2023 agar terjadi sinkronisasi antara OPD, BAPEDA, Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kedelapan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/126/BKUD3.3/2023 Tentang PPKD Pada OPD Prov. NTT T.A 2023 nomor 900/136/BKUD3/2023 Tanggal 03 Juli 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/109/BKUD3.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Prov. NTT T.A 2023 Nomor 900/148/BKUD3/20023 Tanggal 12 Juli 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kesembilan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/388/BKUD3.3/2022 Tentang PPKD Pada OPD Prov. NTT T.A 2023 Nomor 900/164/BKUD3/2023 Tanggal 10 Agustus 2023
- Membuat surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/38/BKUD3.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Prov. NTT T.A 2023 nomor 900/166/BKUD3/20023 Tanggal 11 Agustus 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/388/BKUD3.3/2022 tentang PPKD pada OPD Prov NTT TA. 2023 Nomor 900/175/BKUD3/2023 Tanggal 22 Agustus 2023
- Membuat Keputusan Gubernur Tentang : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 Nomor 345/KEP/HK/2023 Tanggal 31 Oktober 2023
- Membuat Surat Keputusan Gubernur Tentang: Perubahan Kesebelas atas lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/388/BKUD3.3/2022 tentang PPKD pada OPD Prov. NTT TA 2023 Nomor 900/223/BKUD3/2023 Tanggal 10 November 2023



- Membuat Keputusan Gubernur Tentang: Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/388/BKUD3.3/2022 tentang PPKD pada OPD Prov. NTT TA. 2023 Tanggal 14 November 2023
 - Membuat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/38/BKUD3.3/2022 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Pada OPD Prov. NTT TA. 2023 Nomor 900/223/BKUD3/2023 Tanggal 10 November 2023
 - Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Ketujuh atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/38/BKUD3.3/2022 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada OPD Prov. NTT T.A 2023 Nomor 900/225/BKUD3/2023 Tanggal 14 November 2023
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 97,35%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
- Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 1 Dokumen.
 - Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 3 Dokumen.
 - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen.
- Pada Tahun Anggaran 2023 rincian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai berikut:
- Tersusunnya dan tersedianya dokumen Laporan Keuangan SKPD (*Unaudited dan Audited*) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
 - Terlaksananya koordinasi dan pendampingan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - Tersusun dan tersedianya dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (*Unaudited dan Audited*).



- Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, serta tersusun, ditetapkan sampai tersedianya dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
 - Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, serta tersusun, ditetapkan sampai tersedianya dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 89,97%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah sebanyak 1 Dokumen.
 - Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Dokumen.
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 1 Dokumen.
 - Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi sebanyak 30 Dokumen.
- Pada Tahun Anggaran 2023 rincian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
- Tersusunnya Laporan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023.
 - Tersusunnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
 - Tersusunnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57B tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.



- Tersusunnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 94,95%. Program Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu:
 - Terlaksananya Survey harga barang dan jasa dalam wilayah Provinsi NTT.
 - Terlaksananya Validasi Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024.
 - Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39/KEP/HK/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
 - Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 225/KEP/HK/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023 target Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.3.366.223.976.723,-. Realisasi sebesar Rp. 3.274.081.542.507,92,- atau 97,26 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp.162.930.461.723,- Realisasi sebesar Rp.76.219.322.603,92,- atau 46,78%. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan target sebesar Rp.60.645.290.853,- Realisasi sebesar Rp.60.645.290.853,- atau 100%.
 - 2) Lain-Lain PAD Yang Sah target sebesar Rp.102.285.170.870,- Realisasi sebesar Rp.15.574.031.750,92,- atau 15,23%.
- b. Pendapatan Transfer dengan target sebesar Rp.3.201.541.919.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.194.678.968.455,- atau 99,79%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah target sebesar Rp.1.751.596.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.183.251.449,- atau 181,73 %.



2. Realisasi Belanja

Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah adalah Rp.760.988.379.960,- Realisasi Rp. 747.512.448.116,- atau 98,23% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.99.579.478.083,- Realisasi sebesar Rp. 92.996.930.732,- atau 93,39%.
- b. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.115.368.000,- Realisasi sebesar Rp.115.361.190,- atau 99,99%.
- c. Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.11.055.939.527,- Realisasi sebesar Rp. 882.798.125,- atau 7,98%.
- d. Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp.650.237.594.350,- Realisasi sebesar Rp.653.517.358.069,- atau 100,50%.

3. Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 target Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp. (Rp.20.400.219.049,-) realisasi sebesar (Rp.42.937.445.203,55) atau 210,48 % dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan dengan target sebesar Rp.258.002.344.404,- Realisasi sebesar Rp.221.841.821.002,45,- atau 85,98%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan dengan target sebesar Rp.278.402.563.453,- Realisasi sebesar Rp.264.779.266.206,- atau 95,11%.

Realisasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.014.276.952,- realisasi sebesar Rp. 13.312.945.336,- atau 95 %, melalui kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 217.435.900,- realisasi sebesar Rp. 206.511.700,- atau 94,98%, melalui sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 29.832.400,- atau 99,44%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.60.351.800,- realisasi sebesar Rp.60.292.000,- atau 99,90%.



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp78.455.000,- realisasi sebesar Rp.77.833.700,- atau 99,21%.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.48.629.100,- realisasi sebesar Rp.38.553.600,- atau 79,28%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.354.756.600,- realisasi sebesar Rp.7.729.393.983,- atau 92,51%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.178.762.000,- realisasi sebesar Rp.5.569.375.183,- atau 90,14%.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.996.831.600,- realisasi sebesar Rp.1.986.393.000,- atau 99,48%.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.163.000,- realisasi sebesar Rp. 113.649.000,- atau 95,37%.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 29.992.300,- atau 99,97%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi sebesar Rp29.984.500,- atau 99,95%.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.863.000,- atau 97,26%, melalui sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.93.473.000,- realisasi sebesar Rp.93.391.100,- atau 99,91%, melalui sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.083.016.192,- realisasi sebesar Rp.1.063.444.534,- atau 98,19%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.085.880,- realisasi sebesar Rp. 180.080.400,- atau 99,99%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.70.450.200,- realisasi sebesar Rp57.980.000,- atau 82,30%.
 - Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp.192.606.600,- realisasi sebesar Rp.192.389.647,- atau 99,89%.



- Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp.274.873.512,- realisasi sebesar Rp. 274.434.512,- atau 99,84%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.365.000.000,- realisasi sebesar Rp.358.559.975,- atau 98,24%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.120.764.400,- realisasi sebesar Rp.120.222.811,- atau 99,55%, melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.831.375.860,- realisasi sebesar Rp.3.786.867.560,- atau 98,84%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.565.400,- realisasi sebesar Rp.17.580.600,- atau 48,08%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.750.000.000,- realisasi sebesar Rp.750.000.000,- atau 100%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.044.810.460,- realisasi sebesar Rp.3.019.286.960,- atau 99,16%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.308.455.000,- realisasi sebesar Rp.308.250.648,- atau 99,93%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.261.820.000,- realisasi sebesar Rp.261.775.648,- atau 99,98%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.46.635.000,- realisasi sebesar Rp.46.475.000,- atau 99,66%.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.745.535.766.688,- realisasi sebesar Rp. 671.764.381.067,- atau 90,10% melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan pagu anggaran Rp.9.200.234.333,- realisasi sebesar Rp. 8.744.406.704,- atau 95,05% melalui sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran Rp.329.661.100,- realisasi sebesar Rp. 324.895.281,- atau 98,55%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran Rp.449.915.500,- realisasi sebesar Rp.447.061.444,- atau 99,37%.



- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp.221.362.800,- realisasi sebesar Rp.221.293.060,- atau 99,97%.
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp.168.051.100,- realisasi sebesar Rp. 159.984.600,- atau 95,20%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran Rp. 3.527.033.500,- realisasi sebesar Rp.3.211.739.345,- atau 91,06%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran Rp2.916.490.800,- realisasi sebesar Rp.2.896.585.170,- atau 99,32%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu anggaran Rp.1.587.719.533,- realisasi sebesar Rp.1.482.847.804,- atau 93,39%.
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.2.383.524.700,- realisasi sebesar Rp.2.340.693.226,- atau 98,20% melalui sub kegiatan :
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.548.501.900,- realisasi sebesar Rp.538.108.418,- atau 98,11%.
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.486.866.900,- realisasi sebesar Rp.486.547.270,- atau 99,93%.
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.489.866.400,- realisasi sebesar Rp.486.110.280,- atau 99,23%.
 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.754.797.000,- realisasi sebesar Rp.736.612.616,- atau 97,59%.
 - Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.78.492.500,- realisasi sebesar Rp.69.547.642,- atau 88,60%.



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.23.767.000,- atau 95,07%.
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu anggaran Rp.1.907.327.688,- realisasi sebesar Rp.1.882.523.498,- atau 98,70% melalui sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran Rp.455.918.500,- realisasi sebesar Rp.454.350.100,- atau 99,66%.
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran Rp.243.660.100,- realisasi sebesar Rp.243.275.280,- atau 99,84%.
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan pagu anggaran Rp.384.874.696,- realisasi sebesar Rp.375.200.600,- atau 97,49%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan pagu anggaran Rp.226.999.696,- realisasi sebesar Rp.219.658.873,- atau 96,77%.
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan pagu anggaran Rp.595.874.696,- realisasi sebesar Rp.590.038.645,- atau 99,02%.
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp.2.652.178.702,- realisasi sebesar Rp. 2.581.978.397,- atau 97,35% melalui sub kegiatan :
 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan pagu anggaran Rp.95.680.000,- realisasi sebesar Rp. 95.676.000,- atau 99,99%.
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan pagu anggaran Rp.484.776.602,- realisasi sebesar Rp. 467.960.920,- atau 96,53%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan



pagu anggaran Rp. 2.071.722.100,- realisasi sebesar Rp. 2.018.341.477,- atau 97,42%.

- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 729.392.501.265,- realisasi sebesar Rp. 656.214.779.242,- atau 89,97% melalui sub kegiatan :
- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah dengan pagu anggaran Rp.63.374.211.388,- realisasi sebesar Rp.62.884.046.386,- atau 99,23%.
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu anggaran Rp.5.424.756.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%.
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran Rp.11.055.939.527,- realisasi sebesar Rp.882.798.125,- atau 7,98%.
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi dengan pagu anggaran Rp.649.537.594.350,- realisasi sebesar Rp.653.517.358.069,- atau 100,61%.
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.438.336.320,- realisasi sebesar Rp.1.365.698.375,- atau 94,95% melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga.



LAMPIRAN



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP ini mencakup data dan informasi rencana target kinerja, pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi, serta hasil pencapaian kinerja yang didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh, serta kendala/permasalahan yang dihadapi berserta upaya penanggulangannya selama Tahun 2023.

LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 2 (dua) Program Urusan yang merupakan indikator kinerja utama RPJMD Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan yang merupakan program pendukung indikator kinerja utama. Capaian kinerja indikator RPJMD Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara yaitu 100% pada tahun 2023.

4.2 Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian pekerjaan.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja merupakan salah satu dimensi penting yang harus dilaksanakan secara berkala untuk mengukur dan memperbaiki capaian kinerja sehingga menjadi dasar dalam perbaikan kinerja secara keseluruhan.



3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Ketepatan Waktu didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sangat diperlukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.



LAMPIRAN